

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Tahun 2025 Dianggarkan Rp 12,23 Miliar

WONOSARI (KR) - Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendaptan Belanja Daerah APBD) Rp 12,23 miliar. Jumlah tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya mencapai Rp 26 miliar. Untuk mencapai target program maksimal kekurangannya akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APB-DP). Uji coba makan bergizi gratis akan dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan

Komando Distrik Militer (Kodim) 0730. "Pemda juga masih menunggu juknis dari pusat," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono SIP MT, Selasa (7/1). Hal serupa juga dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul M Arif Aldian SIP MSI, pelaksanaan makan bergizi gratis saat ini ditangani langsung Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk penejelasan selengkapnya masih menunggu petunjuk teknis

dari pusat. Sebelumnya Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto SKom MSI di depan kelompok-kelompok tani pernah menjelaskan ada 40 titik dan tiap titik program makan bergizi gratis (MBG) 3.000 porsi sehingga jumlah seluruhnya ada 120 ribu porsi setiap harinya. Program ini harus didukung bahan baku yang memadai. Para petani, terutama petani muda hendaknya mulai sekarang memanfaatkan setiap jengkal tanah untuk ditanami sayuran dan sebagai-

(Ewi)



KR-Endar Widodo

Kegiatan uji coba makan gratis Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di SD Nglundur

TIM ULTRA KR-KORWILBIDDIK WONOSARI
Bedah Kisi-kisi, Tingkatkan Kompetensi Guru



KR-Dedy EW

Sunata MPd membuka bedah kisi-kisi.

WONOSARI (KR) - Tim Ultra Kedaulatan Rakyat (KR) bekerjasama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilbiddik) Wonosari menyelenggarakan bedah kisi kisi Asesment Pendidikan Standarisasi Daerah (ASPD) di Aula KPRI Bangun Wonosari, Selasa (7/1). " Melalui bedah kisi-kisi ini nantinya guru diharapkan meningkatkan kompetensinya. Sehingga mampu

untuk mendorong semangat peserta didik dalam belajar dan meningkatkan prestasi," kata Ketua Korwilbiddik Wonosari Sunata MPd. Kegiatan dihadiri Ketua K3S Wonosari Ngatija MPd, pengawas serta 58 guru dari 41 sekolah negeri dan swasta. Ketua K3S Wonosari Ngatija menambahkan, pelaksanaan bedah kisi kisi menjadi pintu masuk ke Langkah berikutnya. Setelah guru guru memahami bagaima-

na inti dari setiap kisi-kisin, nantinya kemudian bisa menerapkan kepada siswa. Guru harus bisa mengambil poko dan mengimplementasikan kepada peserta didiknya masing-masing. " Sehingga nantinya pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa," ujarnya. Diungkapkan, dengan pembelajaran yang mudah, tentunya peserta didik akan lebih mudah memahami. Guru juga diharapkan nantinya bisa segera untuk menyusun soal, dengan basis pelaksanaan bedah kisi-kisi. Berkait dengan pelaksanaan ASPD nantinya juga diadakan try out baik dari kapanewon, DIY maupun di sekolah masing-masing. " Karena materi cukup banyak guru perlu berinovasi, sehingga siswa ini bisa menerima pembelajaran dengan lebih baik," jelasnya.

(Ded)

GOES TO SCHOOL SATPOL PP 2025
Cegah Juga Judol Masuk Sekolah

WONOSARI (KR) - Sebagaimana yang dilaksanakan tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 ini juga ada program Goes to School. Sasarannya sama dengan tahun lalu sebanyak 6 sekolah, SMP) dan pendidikan menengah. Kegiatan ini selain mengenalkan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, juga mencegah masuknya narkoba, kenakalan remaja , menanamkan disiplin dan juga mencegah masuknya judi online (judol) ke sekolah. "Pemerintah sedang berusaha keras agar masyarakat tidak terlibat judi online, termasuk jangan sampai merambah di kalangan pelajar," kata Kepala Sat-



KR-Endar Widodo

Kegiatan Goes to School Satpol PP Kabupaten Gunungkidul.

pol PP Kabupaten Gunungkidul Edy Basuki SIP MSI, Selasa (7/1). Pelaksanaan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk Polres Gunungkidul, Penggerak PPK, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan organisasi lain yang terkait dengan pembinaan pelajar dan remaja.

Dalam pertemuan dengan para siswa tersebut juga memberikan motivasi siswa untuk meningkatkan semangat belajar, menjaga sopan santun serta dapat melakukan kegiatan yang positif, selain berprestasi dibidang akademik juga mampu melakukan invonasi ketrampilan berusaha.

(Ewi)

BANYAK SAPI MATI AKIBAT PMK
Komisi B Desak KLB dan Percepat Penanganan



KR-Dedy EW

Hanif dan Arintoko memberikan keterangan pers.

WONOSARI (KR) - Maraknya sapi yang mati di Gunungkidul akibat kasus Penyakit Mulut dan Kuku, Komisi B DPRD mendesak Pemkab menetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Hanif Afadil Darajat didampingi Sekretaris Lasarus Arintoko, Senin (6/1) mengungkapkan, jumlah yang terjangkit sudah cukup banyak, begitu pula yang mati. Salah satunya di UPT Karangmojo

data yang masuk terdapat 20 sapi mati akibat PMK. "Dengan ditetapkan sebagai KLB, diharapkan penanganan wabah ini mendapat atensi dari pemerintah pusat," kata Hanif Afadil Darajat kepada wartawan. Diungkapkan, kasus PMK di Gunungkidul semestinya masuk KLB. Terlebih, penanganan PMK di Gunungkidul belum terkoordinasi dengan baik oleh pihak berwenang dalam hal ini Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul. "Dinas sudah gerak, hanya saja dukungan infrastrukturnya masih kurang. Jumlah vaksin yang tersedia kurang. Juga jumlah SDM yang terjun menangani hal-hal teknis di lapangan terbatas," ujarnya.

Hanif menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan asuransi atau ganti rugi atas ternak milik warga yang mati akibat penyakit. Raperda asuransi ternak mati sudah ada, tinggal Perbup-nya, Harapannya tahun ini bisa terealisasi. " Anggaran Dinas Peternakan untuk penyediaan obat dan vaksin perlu ditambah. Alasannya, wabah terjadi hampir tiap tahun. Juga perlu dibuat Raperda inisiatif tentang pendirian Rumah Pematangan Hewan (RPH)," imbuhnya.

(Ded)

KPU GUNUNGKIDUL TUNGGU REGULASI

Diundur, Pelantikan Bupati Terpilih 2024

WONOSARI (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menunggu regulasi terbaru terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terpilih 2024 serentak secara nasional diundur.

Pengunduran jadwal pelantikan tersebut karena menunggu semua hasil gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. "Meskipun Gunungkidul tidak ada sengketa Pilkada tetapi kami masih menunggu regulasi terbaru kemungkinan berlangsung maret 2025 mendatang," kata Ketua KPU Gunungkidul,

Asih Nuryanti.

Dikatakan bahwa sesuai proses tahapan sudah dilakukan termasuk untuk penetapan pasangan calon terpilih, KPU Gunungkidul sesuai dengan surat dari KPU RI untuk melaksanakan penetapan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih tertanggal 6 Januari 2025. Adapun pelaksanaan akan digelar pada 9

Januari 2025.

Kemudian tanggal 10 Januari 2025, pasangan calon terpilih nanti akan diusulkan untuk dilantik. Usulan itu akan dikirim ke Gubernur DIY melalui Sekretaris Dewan (Sekwan). Pengesahan diatur melalui Peraturan Presiden.

Berdasarkan informasi yang diterima untuk rencana pelantikan kepala daerah terpilih yang semula dilaksanakan pada awal bulan Februari 2025. Tetapi dari informasi terbaru pelantikan tersebut bakal diundur hingga bulan Maret 2025. " Karena

menunggu selesainya sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Sementara berdasarkan jadwal diawal pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih pada Pilkada 2024, dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025. Penundaan pelantikan kepala daerah dikarenakan Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024, paling lambat pada 13 Maret 2025.

(Bmp)

HASIL KAJIAN DAN EVALUASI

Sejumlah Ruas Jalan Berubah Status Kewenangan

WONOSARI (KR) - Ruas jalan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan evaluasi mengenai status jalan baik jalan desa, jalan kabupaten,propinsi hingga jalan nasional. Evakuasi tersebut bertujuan untuk menata agar status jalan lebih sesuai dengan ketentuan teknis sehingga dalam pengelolaannya lebih tepat dan lebih optimal.Gunungkidul memiliki ribuan kilometer jalan yang status kewenangannya milik pemerintah kabupaten. Dari 1.136 kilometer ruas jalan tersebut, kondisinya beragam ada yang sudah bagus, rusak ringan hingga berat. " Untuk mempercepat penanganan, pemerintah melakukan evaluasi dan perubahan status jalan kabupaten ini," kata Sekretaris DPUPRKP Gunungkidul, Wahyu Ardi Nugroho. Evaluasi mengenai tersebut sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

Hasilnya, ada beberapa ruas jalan yang status kewenangannya turun maupun naik. Hasil evaluasi dan kajian dari ruas jalan sepanjang 1.136,66 km jalan milik kabupaten saat ini berubah menjadi 1.088 km. Sedangkan sisanya beralih baik turun maupun naik status kewenangannya. Selain memang berubah kewenangan hal ini juga karena adanya pembangunan JJLS serta jalan di kawasan utara.

Berikut ini rincian jalan yang berubah status yaitu 36 ruas jalan dari jalan kabupaten berubah menjadi jalan desa. Kemudian 15 ruas jalan desa beralih menjadi jalan kabupaten, 11 ruas jalan provinsi menjadi jalan kabupaten, dan 4 ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. "Untuk perubahan ini sudah disepakati dan ditetapkan bupati," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala



KR-Istimewa

Bupati Gunungkidul H Sunaryanta lakukan pengecekan kondisi ruas jalan di wilayahnya.

DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto mengungkapkan, panjang jalan berstatus milik Kabupaten Gunungkidul mencapai 1.136,66 km yang berada di seluruh wilayah. Dari jumlah tersebut, baru 34,8 persen yang dalam kondisi baik, sedangkan sisanya masih dalam kondisi rusak ringan, sedang, hingga berat. Data rinciannya 25,8 persen dalam kondisi rusak berat, 11 persen dalam

kondisi rusak ringan, dan 28,5 persen dalam kondisi rusak sedang. Jumlah jalan yang rusak persentasinya lebih besar dari yang dalam kondisi bagus atau baik.

"Penanganan jalan membutuhkan anggaran yang nilainya fantastis, sedangkan kemampuan anggaran daerah yang minim dan membutuhkan anggaran yang sangat besar," ucapnya.

(Bmp)

NEKAD BERENANG DI PANTAI SLILI

Wisman Asal Turki Terseret Ombak, Diselamatkan SAR

WONOSARI (KR) - Tim SAR Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi II DIY berhasil menyelamatkan seorang Wisatawan Manca Negara (Wisman) asal Turki FG (45) yang digulung ombak di perairan Pantai Slili Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi II DIY Surisdiyanto, mengatakan korban yang saat kejadian bermain air terlalu ke tengah dan ketika terjadi ombak besar korban tidak dapat menepi dan akhirnya terseret ombak ke tengah laut.

Kebetulan Saat krjadian petugas Satlinmas sedang patroli dan langsung memberikan bantuan," ujarnya, Selasa (7/1). Sebelum kejadian ombak terjadi landai tetapi menjelang petang hari terjadi gelombang tinggi. Korban yang tidak hafal kondisi gelombang laut langsung terseret ombak.

Adapun untuk proses penyelamatan korban menggunakan perahu Jungkung sebab lokasinya sudah jauh dari daratan. Beruntung, kor-



KR-Bambang Purwanto

Pantai Slili tempat Wisman Turki terseret ombak

ban masih bisa diselamatkan dan setelah berhasil dibawa ke tepi pantai langsung dilarikan ke RSUD Saptosari. " Kini korban dalam perawatan di RSUD Wonosari karena kondisinya lemas," ujarnya.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi II Pantai Baron, Marjono, berharap wisatawan mematuhi aturan yang sudah terpasang maupun imbauan yang dilakukan petugas lapangan.

Sebelum kejadian seluruh wisatawan sudah diingatkan agar tidak mandi maupun berenang di laut. Begitu korban bersama temannya datang di Pantai Slili mereka nekat dan akhirnya terseret ombak dan diselamatkan SAR.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang untuk menghindari hal terburuk yanh tidak diinginkan." tandasnya.

(Bmp)